

**DPRD Balikpapan RDP Bersama BPPDRD**  
**Fokus Optimalisasi Peningkatan PAD dan *Update* Data Terkini PBB**



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,05/04/2024*

**Komisi II DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengetahui data terbaru Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan Pemkot Balikpapan**

**BALIKPAPAN** – Komisi II DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) di Ruang Rapat Gabungan, Kamis (4/4).

Kepala BPPDRD Balikpapan, Idham menyampaikan dalam pertemuan tersebut membahas penyerapan anggaran 2023, progres 2024, dan rencana kerja di 2025.

“Ada beberapa yang menjadi masukan Komisi II DPRD terkait upaya optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak,” ucap Idham kepada media.

Ia mengatakan, harapan dari Komisi II DPRD Balikpapan adalah pembaruan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan (Pemkot) Balikpapan lebih merata. “Ini dilakukan agar lebih merata di seluruh daerah karena potensi PBB yang seharusnya naik itu disesuaikan,” ujarnya.

Dijelaskan Idham, untuk triwulan pertama ini PAD cukup signifikan di beberapa sektor. “Di pajak restoran misalnya cukup meningkat, begitu juga pajak hotel okupansinya juga besar. Sementara, PBB baru kita distribusikan ke masyarakat per akhir Maret. Di mana awal April masyarakat sudah bisa membayar PBB di tempat-tempat yang disediakan,” ungkapnya.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Slamet Iman Santoso membenarkan pihaknya meminta adanya *update* terkini terkait proses pendataan mengenai PBB. “*Alhamdulillah*, untuk tahun ini difokuskan itu di Balikpapan Timur. Diharapkan di 2024 *update* data ini sudah terselesaikan, sehingga persoalan-persoalan pajak sudah *clear*,” kata Iman.

Dikatakannya, persoalan pembaruan data ini dikeluhkan oleh masyarakat yang selalu berubah-ubah karena melalui *outsourcing* atau pengelola dari pihak ketiga. “Ketika *outsourcing* tidak *connect*, maka terjadi masalah. Artinya, katakan itu sudah A di data, eh ternyata masih muncul lagi di data yang lama. Nah kami berharap Pak Idham bisa menyelesaikan itu. Dari enam kecamatan, hanya beberapa kecamatan yang sudah dilakukan *update* data. Nah, selebihnya ada anggaran-anggaran lebih lanjut lagi,” ungkapnya.

Dia menyarankan agar BPPDRD melakukan opsi pemetaan pajak di restoran-restoran karena selama ini itu juga tidak berjalan dengan baik. “Sehingga ke depan dengan kepemimpinan Pak Idham itu bisa terealisasi dengan baik, mudah-mudahan saja capaian PAD sekitar Rp1 triliun tercapai,” pungkasnya. **(dwn/rdh/k15)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, DPRD Balikpapan RDP Bersama BPPDRD Fokus Optimalisasi Peningkatan PAD dan *Update* Data Terkini PBB, 05/04/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022), pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 4 ayat (2) UU 1/2022 dijelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. pajak reklame;
  - e. PAT;
  - f. pajak MBLB;
  - g. pajak sarang burung walet;

- h. opsen PKB; dan
  - i. opsen BBNKB.
3. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, objek pajak PBB yang selanjutnya disebut objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang merupakan objek pajak PBB sektor perkebunan, PBB sektor perhutanan, PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi, PBB sektor pertambangan untuk perusahaan panas bumi, PBB sektor pertambangan mineral atau batubara, dan PBB sektor lainnya.